Agritexts: Journal of Agricultural Extension, 50(2), 91-104, 2026
URL: https://jurnal.uns.ac.id/agritexts/article/view/126828
DOI: https://doi.org/10.20961/agritexts.v50i2.126828

AGRITEXTS
Journal of Agricultural Extension
ISSN 2721-5903 (Print) 2721-5911 (online)

Modal Sosial Kelompok Tani di Tengah Alih Fungsi Lahan pada Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang

Social Capital Of Farmer Groups Amid Land Conversion In Sukamulya, Sematang Borang, Palembang

Anwar Safaat[1)], Yosi Arianti[2)], Gita Isyanawulan[*3)], Yulasteriyani[4)], Safira Soraida[5)], Elita Aidillah[6)]
Universitas Sriwijaya
**Corresponding author:* gitaisyanawulan@fisip.unsri.ac.id

Abstract
Land conversion threatens the livelihoods of farmers in Sukamulya, Palembang, where access to cultivated land increasingly depends on informal agreements. This qualitative case study examines how three farmer groups within Gapoktan Marjasuma mobilise social capital to sustain farming. Eleven purposively selected informants comprised two gapoktan administrators, six farmers and three supporting informants. Data from interviews, observation and documents were interpreted using Putnam's concepts of trust, norms, networks, bonding and bridging social capital. Internal ties facilitated information exchange, mutual assistance and access to alternative plots, while connections with traders supported local marketing. Agricultural extension officers provided information and facilitated access to government programmes; their institutionally mediated relationships also displayed characteristics of linking social capital. However, these relationships did not give farmers control over landowners' decisions to sell or convert land. The findings distinguish the capacity to sustain farming activities from the capacity to secure land tenure. Social capital can moderate short-term livelihood disruptions but cannot independently prevent land conversion. Extension services could improve access to legitimate land-use information, transparent assistance procedures, alternative marketing channels and opportunities for younger farmers. The study's single-gapoktan scope and lack of longitudinal observation limit wider transferability and assessment of network change.

***Keywords**: Agricultural Extension; Institutional Networks; Livelihood Adaptation; Social Trust*

Abstrak
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah modal sosial kelompok tani di tengah alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi permukiman di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kelompok tani dalam memperkuat modal sosial dalam menghadapi alih fungsi lahan serta menganalisis pemanfaatan modal sosial *bonding* dan *bridging* untuk mempertahankan kelangsungan usaha tani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Unit analisis penelitian adalah tiga kelompok tani dengan informan yang dipilih secara purposif, meliputi dua informan kunci, enam informan utama, dan tiga informan pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan kerangka analisis teori modal sosial Robert D. Putnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi modal sosial petani di tengah alih fungsi lahan menuntut upaya penguatan melalui komunikasi, musyawarah, transparansi bantuan, pemeliharaan kepercayaan, gotong royong, pertemuan rutin kelompok, serta akses terhadap lahan. Modal sosial *bonding* dimanfaatkan untuk bertukar informasi tentang lahan pengganti dan bantuan tenaga yang ditopang hubungan kekerabatan, kesamaan pekerjaan, dan asal daerah, sementara modal sosial *bridging* berlangsung melalui pendampingan penyuluh dan jaringan pemasaran dari tengkulak lokal yang memastikan hasil panen tetap terserap. Temuan tersebut memperlihatkan modal sosial sebagai sumber daya adaptif, namun dominasi ikatan internal yang tidak diimbangi oleh perluasan jaringan eksternal membuat modal sosial hanya meredam dampak kehilangan lahan dan mempertahankan kegiatan usaha tani secara terbatas, tetapi tidak dapat menghentikan alih fungsi lahan.

Kata kunci: Adaptasi Penghidupan; Jaringan Kelembagaan; Kepercayaan Sosial; Penyuluhan Pertanian

***Cite this as**:* Safaat, A., Arianti, Y., Isyanawulan, G., Yulasteriyani, Soraida, S., & Aidillah, E. (2026). Modal Sosial Kelompok Tani di Tengah Alih Fungsi Lahan pada Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 50(2), 91-104. doi: https://doi.org/10.20961/agritexts.v50i2.126828

Copyright © 2026 Universitas Sebelas Maret

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memegang peranan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia sekaligus menjadi tumpuan utama penghidupan masyarakat. Aktivitas bertani tidak semata-mata menghasilkan bahan pangan, melainkan juga membentuk tatanan sosial dan budaya masyarakat melalui pola kerja bersama, kerja sama, serta tradisi yang diwariskan lintas generasi. Kendati demikian, kelangsungan sektor ini kini berhadapan dengan tantangan yang cukup berat akibat semakin meluasnya alih fungsi lahan di berbagai daerah. Lahan yang semula menjadi ruang produksi pertanian beralih menjadi permukiman, kawasan industri, maupun peruntukan lain, sehingga ruang gerak petani untuk mengusahakan lahannya semakin menyempit. Penyempitan tersebut tidak hanya berimbas pada menurunnya hasil panen, tetapi juga mengancam kestabilan ekonomi rumah tangga petani yang sangat bergantung pada luas lahan garapan, sehingga berpotensi menggerus ketahanan pangan lokal serta mengubah pola hidup masyarakat secara menyeluruh (Setiawan et al., 2020)

Tabel 1. Perubahan Luas Lahan di Kota Palembang Tahun 2012-2025

No	Jenis Penggunaan Lahan	Lahan lama	Lahan Baru
1	Permukiman	42,72 ha	240,66 ha
2	Industri	0,97 ha	498,96 ha
3	Perkebunan	11,4 ha	4,11 ha
4	Sawah	2623,56 ha	1504,17 ha
5	Lahan Kering (Kebun Campuran Palawija-Hortikultura)	519,8 ha	6,05 ha

Sumber: Bappeda Kota Palembang, 2025

Kondisi tersebut secara empiris tercermin di Kota Palembang. Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang periode 2012–2025 memperlihatkan luas permukiman meningkat dari 42,72 hektare menjadi 240,66 hektare dan lahan industri melonjak dari 0,97 hektare menjadi 498,96 hektare, sementara luas sawah menyusut dari 2.623,56 hektare menjadi 1.504,17 hektare dan lahan kering merosot dari 519,8 hektare menjadi 6,05 hektare.

Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang yang dikutip dalam Yuliantina et al. (2024) menunjukkan adanya perubahan luas lahan sawah di Kecamatan Sematang Borang. Luas sawah tercatat sebesar 116,1 hektare pada 2020, menurun menjadi 70,0 hektare pada 2021, kemudian meningkat menjadi 85,0 hektare pada 2022, dan tercatat 0,0 hektare pada 2023. Angka tersebut merujuk pada luas sawah yang tercatat dalam sumber tersebut, bukan keseluruhan lahan pertanian, sehingga tidak dapat langsung diartikan bahwa seluruh kegiatan pertanian telah berhenti. Sementara itu, data Kelurahan Sukamulya menunjukkan penurunan luas lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian selama periode 2020 - 2026. Luas lahan tanaman padi berkurang dari 30 hektare menjadi 2 hektare, jagung dari 5 hektare menjadi 0,25 hektare, dan sayuran dari 10 hektare menjadi 2 hektare. Kondisi ini menunjukkan semakin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani untuk mempertahankan kegiatan usaha tani di Kelurahan Sukamulya.

Penyusutan tersebut terjadi melalui konversi lahan menjadi permukiman dan area perdagangan. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa lahan yang dahulu digarap petani, khususnya mereka yang tergabung dalam kelompok tani, sebagian besar telah dibeli oleh pengembang untuk dibangun menjadi kompleks hunian. Beberapa kelompok tani yang sebelumnya aktif, yaitu Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani Cahaya, bahkan telah dibubarkan karena ketiadaan lahan serta menyusutnya jumlah anggotanya. Kondisi serupa dialami oleh tiga kelompok tani yang masih tergabung dalam Gapoktan Marjasuma, yaitu Poktan Tumbuh Murni, Poktan Sidomulyo, dan Poktan Sidodadi. Sebagian anggota memilih mengundurkan diri karena tidak lagi memiliki lahan, sementara sebagian lainnya tetap bertahan dengan menggarap lahan milik orang lain berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa alih fungsi lahan tidak hanya mengancam produksi pertanian, melainkan juga menggerus struktur kelembagaan kelompok tani serta mempersempit ruang gerak petani dalam mempertahankan sumber penghidupannya (Anggi Apriliani & Abiyyu Rifqi Pratama, 2026). Di tengah kondisi itu, Kelurahan Sukamulya menjadi satu-satunya wilayah di Kecamatan Sematang Borang yang masih mempertahankan aktivitas pertanian.

Dalam klasifikasi yang lebih terperinci, hubungan horizontal antarkelompok yang relatif setara dapat dibedakan dari hubungan vertikal dengan lembaga yang memiliki kewenangan dan sumber daya. Oleh karena itu, hubungan petani dengan PPL dan pemerintah memiliki karakteristik modal sosial *linking*, sedangkan hubungan dengan sesama kelompok tani atau jejaring pasar dapat dibahas sebagai modal sosial *bridging* sesuai kedudukan aktor dan bentuk interaksinya. Pembedaan ini digunakan sebagai klarifikasi batas konsep, bukan sebagai penggantian kerangka utama *bonding – bridging* yang digunakan dalam penelitian.

Dalam menghadapi situasi tersebut, kelompok tani tidak semata-mata bertumpu pada faktor ekonomi, melainkan juga memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya. Putnam (2000) mendefinisikan modal sosial sebagai fitur organisasi sosial berupa jaringan (networks), norma (*norm*s), dan kepercayaan (trust) yang memfasilitasi tindakan dan kerja sama terkoordinasi untuk kemanfaatan bersama. Putnam membedakan modal sosial pengikat (*bonding*) yang bersifat eksklusif dan berorientasi ke dalam, dengan modal sosial penjembatan (*bridging*) yang bersifat inklusif dan berorientasi keluar (Santoso, 2020). Dalam konteks pertanian, modal sosial merupakan aset yang lahir dari interaksi petani, kelompok tani, penyuluh, dan pedagang, yang memungkinkan petani mengakses pengetahuan, teknologi, pasar, serta dukungan dari pihak luar (Syarif, A., Arwati, S., & Firmansyah, 2025).

Dalam konteks penyuluhan pertanian, analisis modal sosial penting untuk menjelaskan kedudukan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai penghubung antara kelompok tani dengan program pemerintah. Temuan tentang keterbatasan jejaring pasar, akses terhadap lahan, dan adanya regenerasi juga relevan untuk menilai ruang intervensi penyuluhan di kawasan pinggiran kota. Literasi digital dapat menjadi kemungkinan arah pengembangan layanan, tetapi bukan temuan intervensi yang diuji dalam penelitian ini.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji modal sosial pada masyarakat tani. Setiawan et al. (2020) menemukan bahwa kepercayaan, norma, dan jaringan menopang keberlanjutan pertanian di tengah alih fungsi lahan, namun belum menguraikan dinamika penguatan atau pelemahan modal sosial itu sendiri. Yuliantina et al. (2024) menganalisis pengaruh modal sosial terhadap alih fungsi lahan secara kuantitatif dengan asumsi hubungan langsung, sebuah asumsi yang cenderung menyederhanakan realitas. Rinjani et al. (2025) (Santoso & Si, n.d.) menyoroti dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi sosial ekonomi dan strategi adaptasi petani, tetapi belum menempatkan modal sosial sebagai kerangka analisis. Kajian penguatan modal sosial kelembagaan tani, seperti Syofian et al. (2020), (Devi, Supraptiningsih, Mubaroq, 2023), M. R. Burhan et al. (2022), (Rahmadani et al. 2025), dan Subangkit et al. (2020) umumnya dilakukan dalam kondisi normal tanpa tekanan alih fungsi lahan. Sementara itu, penerapan tipologi *bonding* dan *bridging* oleh Farchan (2019) dan Alfianti et al. (2021) belum diarahkan pada persoalan kelompok tani yang berupaya mempertahankan kegiatan pertanian di tengah alih fungsi lahan.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat celah kajian yang menghubungkan isu alih fungsi lahan, kelompok tani, strategi penguatan modal sosial, serta pemanfaatan modal sosial *bonding* dan *bridging* dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini penting dilakukan karena dinamika alih fungsi lahan di wilayah pinggiran kota memberikan tekanan tersendiri terhadap keberlangsungan aktivitas pertanian dan jaringan sosial kelompok tani, sehingga modal sosial dapat diamati secara empiris dalam konteks lokal yang spesifik, yaitu di Kelurahan Sukamulya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kelompok tani dalam memperkuat modal sosial dalam menghadapi alih fungsi lahan pertanian produktif, serta pemanfaatan modal sosial *bonding* dan modal sosial *bridging* untuk mempertahankan kelangsungan usaha tani di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang.

Kontribusi analitis pada penelitian ini terletak pada penjelasan hubungan antara ketidakpastian penguasaan lahan dan cara kerja jaringan sosial petani. Praktik tumpang lahan bergantung pada kepercayaan serta kesepakatan informal dengan pemilik lahan; relasi internal mempercepat pertukaran informasi ketika lahan harus ditinggalkan, sedangkan PPL bertindak sebagai simpul penghubung ke sumber daya kelembagaan. Dengan demikian, modal sosial dapat mengurangi gangguan penghidupan dalam jangka pendek, tetapi tidak dengan mengubah ketimpangan akses terhadap lahan atau memperluas kemitraan eksternal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena dalam konteks alamiah dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data melalui triangulasi, serta analisis yang dilakukan secara induktif dan menekankan pemaknaan temuan daripada generalisasi (Abdussamad, 2021). Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi kelompok tani dalam memperkuat modal sosial serta pemanfaatan modal sosial untuk mempertahankan kelangsungan usaha tani di tengah alih fungsi lahan. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu investigasi mendalam terhadap suatu fenomena pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi guna memperoleh pemahaman yang mendalam (Fiantika et al., 2002).

Penelitian dilaksanakan di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Marjasuma, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Sematang Borang mengalami alih fungsi lahan pertanian secara signifikan, sementara Kelurahan Sukamulya merupakan satu-satunya wilayah di kecamatan tersebut yang masih mempertahankan aktivitas pertanian. Pengumpulan data lapangan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026, dengan pelaksanaan

wawancara dari 11 Mei 2026 hingga 8 Agustus 2026.

Unit analisis penelitian ini adalah kelompok tani di Kelurahan Sukamulya yang melibatkan tiga kelompok tani sebagai studi kasus, yaitu Poktan Tumbuh Murni, Poktan Sidomulyo, dan Poktan Sidodadi, dengan jumlah petani aktif sebanyak 56 orang. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan mengenai aktivitas kelompok tani serta permasalahan alih fungsi lahan di Kelurahan Sukamulya. Penelitian ini melibatkan 11 informan yang terdiri atas dua informan kunci, enam informan utama, dan tiga informan pendukung. Dua informan kunci merupakan Ketua dan Sekretaris Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Marjasuma. Enam informan utama merupakan petani yang berasal dari tiga kelompok tani, yaitu dua petani dari Poktan Tumbuh Murni, dua petani dari Poktan Sidomulyo, dan dua petani dari Poktan Sidodadi. Sementara itu, tiga informan pendukung terdiri atas satu Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Balai Penyuluhan Pertanian Sekojo dan dua pemilik lahan pertanian di Kelurahan Sukamulya. Komposisi tersebut memungkinkan penelitian memperoleh informasi mengenai pengalaman petani dari ketiga kelompok tani, perspektif pengurus gapoktan, serta pandangan pihak eksternal yang terlibat dalam pendampingan pertanian dan penggunaan lahan. Meskipun seluruh kelompok tani terwakili melalui informan utama, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik terhadap seluruh anggota kelompok tani.

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berkedudukan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, sekaligus pelapor hasil penelitian (Moleong, 2022). Instrumen pendukung berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, catatan lapangan, alat perekam audio dan video, serta dokumentasi visual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan kelompok tani, wawancara mendalam semi-terstruktur yang waktunya disesuaikan dengan kesediaan informan, serta dokumentasi berupa arsip, laporan, dan data statistik dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang, serta Kelurahan Sukamulya.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dengan memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi; triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antarinforman; serta triangulasi waktu dengan melakukan pengecekan pada waktu dan situasi yang berbeda. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman 2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan dengan mengolah data hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data wawancara dituangkan dalam bentuk tertulis berdasarkan kombinasi rekaman dan catatan lapangan, dengan mempertahankan ungkapan asli informan yang menggunakan bahasa Palembang. Kutipan yang digunakan dalam artikel dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman.

Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pengelompokan dilakukan berdasarkan konsep modal sosial Robert D. Putnam, yaitu kepercayaan (*trust*), norma (*norms*), dan jaringan (*networks*), serta bentuk modal sosial pengikat (*bonding*) dan penjembatan (*bridging*). Kategori teoretis tersebut digunakan sebagai kerangka awal analisis, kemudian dikembangkan dengan memperhatikan temuan empiris yang muncul dari pengalaman informan, seperti kesepakatan penggunaan lahan, gotong royong, hubungan antarpetani, pendampingan penyuluh, dan jaringan pemasaran hasil pertanian. Dengan demikian, analisis memadukan kategori yang bersumber dari teori dan tema yang berkembang berdasarkan data lapangan.

Pada tahap penyajian data, hasil pengelompokan informasi disusun dalam bentuk uraian naratif, kutipan wawancara, dan tabel temuan untuk memperlihatkan hubungan antara kondisi alih fungsi lahan, strategi penguatan modal sosial, dan upaya mempertahankan kegiatan usaha tani. Peneliti juga memperhatikan perbedaan keterangan antarinforman. Informasi yang menunjukkan ketidaksesuaian atau pertentangan dicatat dan diperiksa kembali dengan membandingkan keterangan informan serta data pendukung yang tersedia. Pemeriksaan tersebut digunakan untuk menghindari penarikan kesimpulan yang hanya didasarkan pada satu sumber informasi.

Tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan pola hubungan antara kepercayaan, norma, jaringan sosial, serta pemanfaatan modal sosial *bonding* dan *bridging* dalam menghadapi alih fungsi lahan. Keabsahan temuan diperiksa melalui triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Penentuan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi pengalaman informan terhadap fokus penelitian. Jumlah akhir 11 informan ditetapkan berdasarkan pertimbangan awal pemilihan informan dan informasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Penelitian ini tidak menggunakan pengukuran kejenuhan data secara formal sehingga ketercukupan data dipertimbangkan berdasarkan cakupan perspektif informan dan relevansi informasi terhadap tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Ekonomi Kelompok Tani di Kelurahan Sukamulya

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan pertokoan di Kelurahan Sukamulya berlangsung secara masif dan terkonfirmasi baik melalui keterangan informan maupun data sekunder. Para informan menggambarkan bahwa lahan yang mereka garap saat ini merupakan sisa dari hamparan yang dahulu luas, bahkan lahan yang baru digarap setahun sebelumnya telah berubah menjadi ruko. Perubahan karakter wilayah dari kawasan sepi menjadi kawasan strategis membuat lahan pertanian kalah bersaing dengan peruntukan lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Gambaran tersebut sejalan dengan data pemanfaatan lahan pertanian Kelurahan Sukamulya pada tabel berikut

Tabel 2. Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kelurahan Sukamulya Tahun 2020 dan 2026

No	Komoditas	Luas Lahan Tani Tahun 2020 (ha)	Luas Lahan Tani Tahun 2026 (ha)
1	Padi	30	2
2	Jagung	5	0,25
3	Sayuran	10	2

Sumber: Kelurahan Sukamulya (2026)

Petani yang masih bertahan pada umumnya telah menggeluti pertanian selama sebelas hingga tiga puluh tahun sejak usia muda. Kelompok tani di Kelurahan Sukamulya bahkan telah terbentuk secara mandiri sejak era 1980-an, sementara Gapoktan Marjasuma baru diresmikan pada 28 September 2008. Rentang waktu yang panjang tersebut memungkinkan tumbuhnya pengenalan karakter, kepercayaan, dan solidaritas di antara para anggota. Sebagian petani mewarisi profesi ini langsung dari orang tua, sehingga jalinan sosial di antara mereka terikat bukan hanya oleh kesamaan pekerjaan, melainkan juga oleh hubungan kekerabatan. Dalam kerangka (Alfitri, 2023), kondisi ini mencerminkan modal sosial *bonding* yang homogen dan berbasis ikatan primordial, di mana kepercayaan antarpetani sudah terbentuk karena hubungan yang telah lama terjalin. Temuan ini memperkuat temuan Syofian et al. (2020) dan M. R. Burhan et al. (2022) mengenai pentingnya durasi dan konsistensi interaksi sebagai sumber modal sosial, sekaligus memperluasnya dengan menempatkan riwayat panjang bertani sebagai fondasi ketahanan di tengah tekanan alih fungsi lahan.

Eksistensi yang telah berlangsung lama tersebut dihadapkan pada persoalan regenerasi. Berdasarkan keterangan penyuluh pertanian setempat, petani yang masih bertahan umumnya berusia lanjut, sementara generasi muda yang bersedia menjadi petani sangat sedikit dan umumnya terlibat karena desakan ekonomi keluarga, bukan karena kesukarelaan. Menurut Putnam, modal sosial hanya dapat direproduksi apabila terdapat aktor baru yang masuk ke dalam jaringan partisipasi dan mewarisi norma yang telah terbentuk. Ketika regenerasi terhenti, jaringan partisipasi warga menyusut dan modal sosial yang terakumulasi selama puluhan tahun terancam kehilangan pewarisnya. Persoalan ini merupakan kontribusi dalam penelitian ini, sebab kajian terdahulu seperti (Devi, Supraptiningsih, Mubaroq, 2023), Burhan et al. (2022), dan Harahap (2025)lebih menyoroti kekuatan modal sosial dalam menopang usaha tani tanpa mempertanyakan keberlanjutan modal sosial itu sendiri.

Ciri khas pertanian di Kelurahan Sukamulya adalah sebagian besar petani bukan pemilik lahan, melainkan penggarap yang menumpang di lahan milik orang lain tanpa dipungut biaya sewa, dengan imbalan berupa pemeliharaan dan menjaga kebersihan lahan. Sistem tumpang lahan ini bahkan dijalankan pula oleh Ketua dan Sekretaris Gapoktan karena luas lahan pribadi mereka tidak memadai untuk usaha tani padi. Petani menyadari bahwa hak mereka atas lahan bersifat sementara dan dapat berakhir sewaktu-waktu apabila pemiliknya menjual lahan tersebut. Dalam kerangka Putnam, sistem ini merupakan wujud nyata kepercayaan sebagai sumber daya ekonomi: pemilik menanggung risiko dengan menyerahkan asetnya untuk digarap, sedangkan petani menanggung risiko dengan menginvestasikan tenaga pada lahan yang bukan miliknya. Keduanya bersedia menanggung risiko karena adanya norma resiprositas yang menjamin manfaat bagi masing-masing pihak, sehingga biaya transaksi dapat ditekan tanpa pengawasan yang mahal. Temuan ini memperluas kajian Setiawan et al. (2020) dan (Devi, Supraptiningsih, Mubaroq, 2023) yang menyoroti kepercayaan horizontal antarpetani, serta mengungkap dimensi kepercayaan vertikal antara petani penggarap dan pemilik lahan yang umumnya bukan penduduk setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani penggarap yaitu bapak Sugeng, menjelaskan:

> "Lahannyo punyo wong, aku cuma numpang dek selagi yang punyo tanah ini belum perlu aku yang merawatnyo, disamping kito butuh nian untuk cari duit." (Terjemahan: "Lahannya milik orang, saya hanya menumpang selama pemilik tanah belum membutuhkannya; saya merawatnya karena perlu mencari nafkah.") (15 Mei 2026)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha tani bergantung pada izin pemilik lahan dan tidak setara dengan kepastian hak atas lahan.

Keseharian petani berlangsung dalam pola yang relatif tetap dan justru melalui keberulangan itulah hubungan sosial terpelihara. Kebiasaan berkumpul

minum kopi pada pagi hari sebelum turun ke lahan berfungsi sebagai ruang sosial tempat informasi mengenai program, bantuan, maupun kabar lahan dipertukarkan, bahkan disampaikan langsung oleh Ketua Gapoktan. Ruang informal ini merupakan wujud jaringan partisipasi warga (*networks of civic engagement*) yang bersifat horizontal, tempat informasi bernilai ekonomi beredar tanpa biaya dan tanpa perantara formal. Sebaliknya, forum formal berupa pertemuan bulanan yang sengaja dijadwalkan malam hari agar tidak mengganggu jam kerja tetap menghadapi kendala kehadiran akibat kelelahan fisik anggota. Kondisi ini memperlihatkan adanya batas material dari partisipasi warga, yaitu tegangan antara tuntutan reproduksi ekonomi dan tuntutan pemeliharaan modal sosial, sebuah dimensi yang belum disorot dalam penelitian Laksono et al. (2022) maupun dan Harahap (2025). Meskipun demikian, kelemahan saluran formal dapat dikompensasi oleh kekuatan saluran informal sehingga arus informasi tetap mengalir.

Dari sisi ekonomi, penghasilan petani yang berstatus menumpang lahan tidak selalu mencukupi kebutuhan hidup, sehingga kelangsungan hidup (survival living) diupayakan melalui diversifikasi mata pencaharian. Temuan penelitian menunjukkan tiga pola yang saling melengkapi, yaitu mengambil upahan untuk menggarap lahan anggota kelompok tani, memadukan usaha tani dengan usaha ternak kambing, dan bekerja sebagai buruh bangunan. Pola upahan menggarap memperlihatkan bahwa jaringan sesama anggota berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi, sejalan dengan temuan Rahmadani et al. (2025) mengenai kerentanan pendapatan buruh tani, sekaligus memperluasnya karena relasi upah kerja tersebut berlangsung dalam keanggotaan kelompok yang sama sehingga justru memperkuat ikatan internal. Diversifikasi ke usaha ternak juga menunjukkan perbedaan penting dibandingkan dengan temuan Bilqis et al. (2024) di Desa Padusan ketidakstabilan hasil pertanian mendorong masyarakat mengalihfungsikan lahan, sedangkan di Kelurahan Sukamulya diversifikasi justru dijadikan strategi untuk mempertahankan profesi bertani. Adapun peralihan menjadi buruh bangunan memperlihatkan batas modal sosial bonding: ketika lahan benar-benar habis, jaringan internal tidak dapat menciptakan lahan baru, dan terdapat ironi struktural bahwa petani yang terdesak oleh pembangunan justru terserap ke dalam sektor pembangunan itu sendiri.

Tabel 3. Ringkasan Temuan Kondisi Sosial dan Ekonomi Petani

No	Temuan	Deskripsi
1	Latar belakang dan pengalaman bertani	Mayoritas petani menggeluti pertanian selama 11 - 30 tahun sejak usia muda; rentang pengalaman yang panjang menjadi fondasi tumbuhnya pengenalan, kepercayaan, dan solidaritas antaranggota.
2	Status penggunaan lahan	Sebagian besar petani bukan pemilik lahan, melainkan penggarap yang menumpang lahan melalui izin lisan berbasis kepercayaan, sehingga relasi dengan pemilik lahan menentukan keberlangsungan usaha tani.
3	Aktivitas dan interaksi sosial	Perjumpaan harian di kebun dan sawah, serta kegiatan seperti yasinan dan arisan, memperkuat kohesi kelompok sekaligus menjadi saluran utama untuk bertukar informasi.
4	Kelangsungan hidup (*survival living*)	Menghadapi penyusutan lahan, petani melakukan diversifikasi nafkah dengan mengambil upah menggarap, beternak kambing, dan bekerja sebagai buruh bangunan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Strategi Kelompok Tani Memperkuat Modal Sosial dalam Menghadapi Alih Fungsi Lahan

Penguatan modal sosial pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk menumbuhkan dan memelihara tiga unsur pokok, yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Putnam (2000); dan Norman Uphoff (2000) membedakan dua ranah penguatan tersebut; ranah struktural yang mencakup peran, aturan, prosedur, dan jaringan yang memfasilitasi kerja sama, serta ranah kognitif yang mencakup nilai, sikap, keyakinan, dan norma yang mendorong orang untuk bekerja sama. Menurut Fadhila & Astuti (2023), penguatan berlangsung melalui partisipasi yang bertumpu pada kepercayaan, kerja sama, jaringan, dan tata nilai seperti saling menghormati serta saling menguntungkan. Kepercayaan menjadi landasan kerja sama, sementara jaringan berfungsi sebagai saluran bagi informasi, pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya. Tata nilai menjaga agar kerja sama tidak hanya didorong oleh kepentingan sesaat, tetapi juga diarahkan pada kepentingan bersama dan keberlanjutan usaha.

Kepercayaan pada kelompok tani di Kelurahan Sukamulya bukanlah sesuatu yang diberikan secara serta-merta, melainkan hasil akumulasi pengalaman interaksi berulang dalam rentang waktu yang panjang. Proses pembentukannya berlangsung melalui pengenalan personal yang tumbuh dari kebersamaan tinggal dan bekerja di wilayah yang sama, kemudian diuji melalui penilaian terhadap konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Kriteria yang dikemukakan informan, yakni jujur, amanah, dan bertanggung jawab, menunjukkan bahwa

kepercayaan bersifat kumulatif dan berbasis rekam jejak. Hal ini persis mencerminkan pandangan Putnam bahwa kepercayaan bersumber dari norma resiprositas dan jaringan partisipasi warga yang terbentuk melalui hubungan sosial yang berkelanjutan. Kepercayaan di sini bukan modal yang diberikan di muka, melainkan modal yang diperoleh (earned trust) melalui akumulasi bukti perilaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan petani yaitu bapak Harnoto yang menjelaskan tentang pembentukan kepercayaan, menyatakan:

> "Ado, kareno kami sudah lamo samo-samo bertani di sini dan hampir setiap bulan betemu dalam kegiatan kelompok." (Terjemahan: "Ada, karena kami sudah lama bertani bersama di sini dan hampir setiap bulan bertemu dalam kegiatan kelompok.") (12 Mei 2026)

Dari pernyataan ini terlihat bahwa interaksi yang terjadi berulang yang menjadi dasar kepercayaan antaranggota kelompok.

Selain kepercayaan horizontal antarpetani, ditemukan juga kepercayaan vertikal antara pemilik lahan dan petani penggarap yang kerap tidak terjalin secara langsung. Mengingat banyak pemilik lahan berdomisili di luar wilayah, hubungan tersebut difasilitasi oleh perantara seperti ketua RT, ketua kelompok, ketua Gapoktan, atau keluarga pemilik. Bahkan terdapat petani yang hingga saat wawancara belum pernah bertemu pemilik lahan yang digarapnya karena seluruh proses berlangsung melalui perantaraan Ketua Gapoktan. Peran tersebut merupakan wujud perantara kepercayaan (trust broker) yang memungkinkan kerja sama berlangsung meskipun kedua pihak tidak memiliki ikatan personal secara langsung. Adapun alasan pemilik bersedia mempercayakan lahannya digarap tanpa sewa dikemukakan secara konsisten, yakni agar lahan tetap terawat, batas-batasnya terjaga, dan terhindar dari penguasaan pihak lain. Dengan demikian, struktur kepercayaan pada kelompok tani ini tergolong kuat dan berlapis, serta menjadi infrastruktur sosial yang menopang seluruh sistem produksi pertanian di wilayah tersebut.

Norma pada kelompok tani dapat dipetakan ke dalam tiga ranah. Pertama, norma yang mengatur pemanfaatan fasilitas bersama berupa alat dan mesin pertanian serta lembaga keuangan mikro, dengan kewajiban mengembalikan alat dalam kondisi baik dan melunasi pinjaman tepat waktu. Kedua, norma yang mengatur hubungan pemilik lahan dan penggarap, yang menempatkan kejujuran dan tanggung jawab sebagai nilai utama serta melarang penggarap menguasai apalagi menjual lahan yang ditumpanginya, disertai kesepakatan pemberitahuan setelah panen apabila lahan hendak dijual. Ketiga, norma resiprositas dalam pertukaran tenaga, terutama saat panen, tidak tertulis, tetapi dipahami secara kolektif. Temuan menarik pada ranah ini adalah pergeseran bentuk norma dari tertulis menjadi tidak tertulis, dengan mekanisme verifikasi oleh ketua kelompok yang mengetahui rekam jejak setiap anggota. Mengacu pada Putnam, pergeseran tersebut justru merupakan indikator penguatan modal sosial, sebab kepercayaan yang telah teruji menekan biaya transaksi sehingga formalisasi aturan tidak lagi diperlukan.

Salah seorang pengurus kelompok yaitu bapak Tiarso, menerangkan bahwa:

> "Kalo selamo ini aturan dan kesepakatan dari yang punyo lahan, boleh boleh bae ditumpangi, tapi kalo nak dijual oleh yang punyo lahan pasti dikabarinyo setelah panen ..." (Terjemahan: "Selama ini pemilik membolehkan lahannya digarap, tetapi ketika akan dijual biasanya diberitahukan setelah panen ...".) (8 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kesepakatan informal memberi kesempatan penyesuaian, tetapi tidak meniadakan hak pemilik untuk menjual lahan.

Penegakan norma berlangsung melalui sanksi sosial yang berjenjang, mulai dari teguran lisan secara kekeluargaan, surat peringatan tertulis, pembatasan akses terhadap fasilitas kelompok, hingga rasa malu yang muncul dalam pertemuan rutin. Seorang informan bahkan mengakui bahwa ia berhenti mengajukan pinjaman karena merasa tidak nyaman ditanyai berulang kali pada setiap pertemuan. Hal ini merupakan bukti empiris bahwa kontrol sosial bekerja melalui internalisasi, bukan pemaksaan eksternal, sebagaimana ditegaskan Putnam mengacu pada Yustika (2008); Alfitri (2023) bahwa kerja sama yang disertai sanksi sosial dapat mengurangi peluang terjadinya penyimpangan.

Jaringan sosial kelompok tani tersusun secara berlapis. Lapisan pertama adalah jaringan internal yang dikoordinasikan oleh Gapoktan, yang tidak sekadar berfungsi sebagai hubungan pertemanan, melainkan sebagai mekanisme tata kelola: pola tanam dikoordinasikan agar tidak terjadi kelebihan produksi yang menjatuhkan harga, sementara bantuan didistribusikan secara bergiliran agar merata. Lapisan kedua adalah jaringan perangkat pemerintahan lokal, meliputi Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat. Lapisan ketiga adalah jaringan kelembagaan melalui Dinas Pertanian Kota Palembang, UPTD Sekojo dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang hadir rutin setiap bulan. Lapisan keempat adalah jaringan dengan perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata yang bersifat insidental. Struktur berlapis ini memperlihatkan perpaduan modal sosial *bonding* dan *bridging* sebagaimana ditegaskan Putnam bahwa masyarakat yang sehat membutuhkan keseimbangan antara solidaritas internal dan keterbukaan jaringan eksternal (Alfitri, 2023).

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa seluruh lapisan jaringan beroperasi melalui satu saluran utama, yaitu pertemuan tatap muka, karena keterbatasan akses terhadap teknologi komunikasi. Sekretaris Gapoktan bahkan tidak memiliki telepon genggam, sehingga penyampaian informasi harus melalui rantai perantara dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ke Ketua RT lalu ke Sekretaris Gapoktan. Ketergantungan pada satu saluran membuat jaringan rentan terhadap keterbatasan waktu dan tenaga anggota, sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan digital (digital divide) yang membatasi perluasan jaringan. Temuan ini memperluas penelitian Fandalla et al. (2023) dan Subangkit et al. (2020) yang menonjolkan kekuatan jaringan tanpa mengungkap kerentanannya. Atas dasar kondisi tersebut, kelompok tani melakukan sejumlah upaya memperkuat diri. Penguatan kepercayaan dilakukan melalui pemeliharaan komunikasi dan musyawarah ketika lahan berkurang, termasuk saling memberi peluang untuk mencari lahan yang masih tersedia; menjaga transparansi dan konsistensi pengurus dalam mengelola bantuan agar tidak menimbulkan kecemburuan; serta memelihara kepercayaan pemilik lahan melalui sikap tahu diri, pemeliharaan lahan, komunikasi yang tidak terputus, bahkan pemberian sebagian hasil panen sebagai ungkapan terima kasih. Penyelesaian perbedaan pendapat secara kekeluargaan dengan ketua kelompok sebagai mediator. Serta pendampingan humanis dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Meskipun demikian, ditemukan pula sisi getir bahwa kepercayaan dan kebaikan petani tidak selalu dibalas setimpal, sebagaimana pengalaman seorang informan yang lahannya dibangun ruko setahun setelah ia membersihkannya tanpa memperoleh upah maupun ucapan terima kasih. Dinamika ini jarang diangkat dalam penelitian terdahulu yang cenderung menampilkan resiprositas sebagai hubungan yang selalu seimbang.

Penguatan norma diwujudkan melalui pemeliharaan kepedulian terhadap anggota yang sakit atau tertimpa musibah melalui kunjungan dan sumbangan, pemberian tunjangan hari raya oleh pengurus, keberadaan kas kelompok, serta gotong royong panen secara bergilir. Penegakan aturan bertumpu pada kesadaran, komitmen, dan sikap saling mengingatkan, dengan sanksi yang lebih bersifat nasihat. Nilai-nilai yang dijunjung meliputi kejujuran, kerja keras, kesabaran, kedisiplinan, sikap pantang menyerah, pemeliharaan silaturahmi, serta nilai-nilai keagamaan. Dalam kerangka Putnam yang membedakan ranah struktural dan kognitif modal sosial, ranah struktural terwujud dalam kas kelompok, Lembaga Keuangan Mikro, dan sistem gotong royong bergilir, sedangkan ranah kognitif terwujud dalam nilai moral dan keagamaan. Perpaduan keduanya menjadikan norma kelompok kokoh, sekaligus memperluas temuan Alfianti et al. (2021) dengan menunjukkan pelembagaan solidaritas melalui kas dan mekanisme bantuan.

Penguatan jaringan dilakukan melalui pemeliharaan kerja sama internal berupa gotong royong panen bergilir, pertemuan rutin yang dilaksanakan secara bergilir di rumah anggota, pengajuan proposal kebutuhan alat dan pupuk kepada Dinas Pertanian melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta pertukaran informasi mengenai lahan kosong beserta pemiliknya. Pengetahuan historis mengenai pembagian kapling awal menjadi sumber daya berharga dalam menelusuri lahan yang masih mungkin digarap, sementara ketua kelompok, ketua RT dan RW, serta keluarga pemilik berperan sebagai perantara. Sistem pertemuan bergilir dari rumah ke rumah mencerminkan prinsip kesetaraan dan mencegah pemusatan peran pada segelintir anggota. Namun demikian, penguatan jaringan lebih banyak mempertahankan hubungan yang telah tersedia daripada membentuk kemitraan baru. Terdapat asimetri yang nyata: jaringan internal dan jaringan dengan pemerintah melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) relatif kuat, sedangkan jaringan dengan sektor swasta dan pasar yang lebih luas masih terbatas. Fungsi jaringan dengan demikian bersifat adaptif, yaitu tidak menghentikan alih fungsi lahan, tetapi mengurangi dampaknya melalui pembukaan akses terhadap lahan pengganti, sebuah nuansa yang membedakan jaringan sebagai mekanisme bertahan (*coping mechanism*) dari jaringan sebagai instrumen perlawanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus Gapoktan yaitu Bapak Marwi, menjelaskan:

> "Kalo informasi samo bantuan itu diperoleh melalui pertemuan rutin kelompok ... kito ngajuin proposal hasil musyawarah." (Terjemahan: "Informasi dan bantuan diperoleh melalui pertemuan rutin kelompok ... kami mengajukan proposal berdasarkan hasil musyawarah.") (11 Mei 2026)

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa pertemuan rutin kelompok menjadi sarana penyampaian informasi mengenai kebutuhan anggota, serta membahas pengajuan dukungan kelembangaan tingkat lokal, dalam pemerintah setempat.

Tabel 4. Ringkasan Temuan Strategi Kelompok Tani Memperkuat Modal Sosial

Aspek	Kondisi	Upaya Penguatan
Kepercayaan (*trust*)	Kepercayaan berlapis, terbentuk dari interaksi jangka 99eputus; mencakup kepercayaan horizontal antarpetani dan kepercayaan 99eputusa kepada pemilik lahan melalui tokoh 99eputusan99.	Menjaga komunikasi dan musyawarah, transparansi dalam pengelolaan bantuan, merawat kepercayaan pemilik lahan, menyelesaikan perbedaan pendapat secara kekeluargaan, serta pendampingan humanis oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Norma (*norm*)	Aturan 99eputusa besar tidak tertulis, mencakup pemanfaatan fasilitas 99eputus, hubungan pemilik lahan-penggarap, dan resiprositas pertukaran tenaga; ditegakkan melalui sanksi sosial berjenjang.	Memelihara kepedulian terhadap anggota yang sakit, kas kelompok dan tunjangan hari raya, gotong royong panen bergilir, penerapan aturan berbasis kesadaran serta sikap saling mengingatkan.
Jaringan (*network*)	Jaringan berlapis meliputi Gapoktan, perangkat RT/RW, lurah dan camat, Dinas Pertanian melalui PPL, serta perguruan tinggi; bertumpu pada saluran tatap muka.	Mempertahankan kerja sama internal, pertemuan rutin bergilir di rumah anggota, pengajuan proposal melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pertukaran informasi lahan, serta pemanfaatan jaringan tokoh 99eputusan99.
Kendala	Partisipasi terbatas akibat beban kerja, kesenjangan akses terhadap teknologi komunikasi, jaringan eksternal yang belum berkembang luas, serta terputusnya regenerasi petani muda.	Penguatan lebih berorientasi pada mempertahankan modal sosial anggota yang tersisa daripada memperluas dan mereproduksinya bagi generasi berikutnya.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Pemanfaatan Modal Sosial *Bonding* dan *Bridging* dalam Mempertahankan Kelangsungan Usaha Tani

Pemanfaatan modal sosial *bonding* dan *bridging* merujuk pada proses mengaktifkan hubungan sosial sebagai sumber daya kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial tidak hanya dipahami sebagai keberadaan jaringan, tetapi juga sebagai kemampuan anggota masyarakat untuk memanfaatkan kepercayaan, norma timbal balik, komunikasi, dan kerja sama yang terkandung di dalam jaringan tersebut (Siregar et al., 2025). Pemanfaatan modal sosial *bonding* berarti memanfaatkan ikatan yang dekat dan relatif homogen, seperti hubungan keluarga, kerabat, tetangga, teman dekat, atau anggota kelompok yang memiliki nilai dan pengalaman serupa. Ikatan tersebut dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan, solidaritas, rasa aman, resiprositas, serta tindakan saling membantu. Dalam praktiknya, *bonding* tampak melalui gotong royong, berbagi sumber daya, pemberian dukungan emosional, dan penyelesaian masalah secara kolektif. Oleh karena itu, bonding berperan sebagai perekat sosial dan jaring pengaman informal yang membantu kelompok mempertahankan kohesi serta memenuhi kebutuhan mendesak ketika akses terhadap sumber daya dari luar masih terbatas (Raodatul Adawia, 2025). Sementara itu, pemanfaatan modal sosial *bridging* merupakan hubungan horizontal yang menghubungkan kelompok internal dengan kelompok lain di luar komunitas inti, misalnya komunitas lain, pelaku usaha, asosiasi, organisasi masyarakat, akademisi, atau jaringan profesional. Hubungan lintas kelompok tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh informasi baru, bertukar pengetahuan, mengembangkan inovasi, memperluas peluang ekonomi, dan membangun kolaborasi yang tidak tersedia dalam jaringan internal (Sayuti et al., 2024).

Praktik pemanfaatan modal sosial *bonding* terlihat paling jelas ketika petani menghadapi persoalan berkurangnya lahan. Sesama petani menjadi pihak pertama yang dimintai bantuan dan diajak berdiskusi, terutama untuk memperoleh informasi mengenai lahan kosong yang masih dapat digarap serta menelusuri pemiliknya melalui riwayat kapling dari pemilik sebelumnya. Selain itu, *bonding* dimanfaatkan dalam kegiatan bertani sehari-hari, khususnya gotong royong saat panen yang diberitahukan jauh hari dan kadang disertai pemberian upah berupa uang atau rokok untuk pekerjaan yang berat. Praktik ini memperlihatkan bahwa gotong royong dan sistem upah berjalan berdampingan, sekaligus menegaskan fungsi *bonding* sebagai perekat sosial yang memungkinkan kelompok homogen saling menopang.

Informasi mengenai informasi lahan, seorang pengurus Gapoktan yaitu bapak Sugiani menyatakan :

"Kalo ado kabar lahannyo nak dijual oleh yang punyo biasonyo itu dikasih

> *waktu setelah mereka panen, nah dari situ gek nyari lahan lain yang kiro-kiro masih ado saling info galo mereka ini."*
> *(Terjemahan: "Jika lahan akan dijual, biasanya petani diberi waktu hingga panen; setelah itu mereka saling bertukar informasi untuk mencari lahan lain.") (8 Juni 2026)*

Modal sosial *bonding* pada Gapoktan Marjasuma juga ditopang oleh ikatan kekerabatan dan kedaerahan. Sebagian anggota memiliki hubungan sepupu, sementara mayoritas lainnya dipersatukan oleh kesamaan asal daerah sebagai sesama perantau dari Jawa, sehingga ikatan kedaerahan bertransformasi menjadi ikatan kekeluargaan fiktif (*fictive kinship*). Melalui jaringan kedaerahan inilah seorang informan perantau memperoleh akses pekerjaan. Menariknya, pemanfaatan *bonding* tidak seragam: sebagian informan menekankan kekeluargaan, sementara sebagian lain memilih bersikap mandiri dan tidak bergantung pada bantuan kerabat. Temuan ini memperkuat penelitian (Devi, Supraptiningsih, Mubaroq, 2023) mengenai basis kekeluargaan modal sosial, sekaligus memperluasnya dengan mengidentifikasi spektrum sikap dari ketergantungan penuh hingga kemandirian relatif, sehingga modal sosial *bonding* memiliki tingkat intensitas yang bervariasi.

Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai fasilitator program dan penghubung antara petani dengan dinas terkait menunjukkan hubungan vertikal yang mencerminkan *linking social capital*. Oleh karena itu, pengelompokan hubungan PPL sebagai *bridging social capital* dalam analisis penelitian ini merupakan penyederhanaan kategori. Hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai *linking social capital* karena melibatkan pihak-pihak dengan kedudukan dan kewenangan yang berbeda.

Praktik pemanfaatan modal sosial *bridging* paling dominan dalam hubungan dengan Dinas Pertanian melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang secara konsisten memberikan arahan, informasi, solusi, dan motivasi. Bentuk lain berupa dukungan perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata yang bersifat insidental, kerja sama antarkelompok tani dalam gotong royong panen dan pemasaran, pemanfaatan bantuan alat mesin pertanian secara kolektif dengan sistem bergiliran, serta kemitraan pemasaran dengan tengkulak dan pengepul yang menyalurkan hasil panen ke Pasar Lemabang, Pasar Perum, dan Pasar Yada. Fenomena yang menarik adalah bahwa sesama petani dapat berperan ganda, yakni sebagai anggota kelompok (*bonding*) sekaligus sebagai pengepul yang menghubungkan kelompok dengan pasar (*bridging*). Pemanfaatan *bridging* juga memperlihatkan adanya keterbatasan yakni kontribusi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dinilai belum terealisasi, serta belum adanya dukungan bagi kelompok tani di Kelurahan Sukamulya. Selain itu, pengalaman bermitra dengan pasar modern yang menerapkan pembayaran tertunda selama tiga hari dan sortir ketat dinilai merugikan para petani, sehingga mereka lebih memilih tengkulak lokal yang membeli hasil panen secara tunai. Sebagian kecil petani mulai memanfaatkan pemasaran daring karena harga tengkulak dinilai lebih rendah, namun praktik ini masih bersifat individual dan terkendala oleh keterbatasan akses terhadap *handphone* dan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan *bridging* tidak selalu otomatis bersifat positif; kepercayaan dan kepastian dalam relasi lebih dihargai petani daripada sekadar akses ke pasar yang lebih besar namun berisiko. Temuan mengenai keterbatasan dan selektivitas *bridging* ini memperluas temuan dalam penelitian Syofian et al. (2020) dan Subangkit et al. (2020) yang cenderung menekankan perluasan jaringan eksternal.

Hubungan petani dengan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menunjukkan bentuk modal sosial bridging yang menonjol berdasarkan hasil wawancara, meskipun belum dapat dinyatakan sebagai jaringan yang paling dominan secara kuantitatif. Hubungan ini membantu petani memperoleh informasi dan akses terhadap bantuan pertanian. Namun, keterbatasan kewenangan penyuluh dan ketergantungan petani pada pasar lokal menyebabkan pilihan strategi adaptasi dalam menghadapi alih fungsi lahan masih terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas PPL yaitu bapak Hidayat, menyatakan:

> *"Kalau kami Penyuluh ini cuma sebagai Fasilitator dan penghubung bae, alih fungsi ini dak pacak dicegah urusan yang punyo lahan itu terserah dio ...". (Terjemahan: "Kami penyuluh hanya berperan sebagai fasilitator dan penghubung; alih fungsi lahan tidak dapat kami cegah karena keputusan berada pada pemilik lahan ...".) (19 Juni 2026)*

Proses pengajuan bantuan melalui PPL dan pemerintah menunjukkan hubungan kelembagaan vertikal yang mencerminkan *linking social capital*. Peran PPL terbatas pada kegiatan penyuluhan dan fasilitasi program. Oleh karena itu, kemampuan PPL dalam membantu petani mengakses bantuan tidak berarti bahwa PPL memiliki kewenangan untuk memengaruhi keputusan pemilik lahan terkait alih fungsi lahan. Temuan ini menunjukkan bahwa petugas penyuluh pertanian berperan dalam mendukung adaptasi petani, tetapi memiliki keterbatasan dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian milik petani.

Ditinjau dari sisi prosesnya, pemanfaatan modal sosial *bonding* berlangsung secara organik melalui komunikasi sehari-hari. Ketika lahan seorang petani akan dijual, ia menyampaikan persoalan tersebut kepada rekan-rekannya dan menerima informasi mengenai lahan lain yang mungkin dapat ditumpangi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan izin kepada pemilik lahan. Proses formalnya berlangsung melalui pertemuan rutin bulanan yang membahas evaluasi, kendala, dan kebutuhan kelompok sekaligus menjadi dasar penyusunan proposal bantuan. Kebersamaan dipelihara melalui pertemuan rutin, arisan, yasinan, silaturahmi yang tetap dijaga, bahkan dengan mantan petani, serta interaksi informal para petani yang terbiasa berkumpul untuk minum kopi sebelum bekerja. Namun proses ini memiliki batas struktural: ketika lahan benar-benar habis terjual, sebagian petani tetap harus beralih menjadi buruh bangunan atau pedagang. Hal ini mengonfirmasi pandangan kritis Putnam bahwa modal sosial efektif dalam memfasilitasi kerja sama, tetapi tidak dapat menciptakan kembali sumber daya material yang hilang.

Sementara itu, proses pemanfaatan modal sosial *bridging* berlangsung melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan bertingkat. Kebutuhan para petani dibahas dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh petani beserta Ketua RT dan RW, kemudian disusun menjadi proposal oleh pengurus, diajukan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) diketahui oleh Lurah dan Camat untuk verifikasi rincian anggaran, lalu diserahkan kepada Dinas Pertanian sebelum bantuan disalurkan kembali kepada kelompok. Informasi mengenai program berasal dari Ketua RT, Ketua RW, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kemudian disampaikan dalam pertemuan rutin bulanan. Ketua Gapoktan menekankan pentingnya keterlibatan anggota secara konsisten dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, bukan hanya saat ada program bantuan. Konsistensi tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan *bridging* agar tetap terjalin secara berkelanjutan dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan untuk memperoleh bantuan. Pandangan penyuluh sebagai salah satu penghubung utama dalam membangun hubungan *bridging* memberikan pemahaman bahwa penyuluh berperan dalam menyalurkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian, seperti traktor, alat semprot, kultivator, dan pompa air, serta bantuan benih untuk komoditas tertentu, seperti jagung ketan, padi, dan cabai. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan petani, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan sarana produksi secara mandiri. Pemanfaatannya dipantau agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Relasi ini menuntut akuntabilitas, yakni satu kelompok tani di Kelurahan Sukamulya yang telah didampingi sejak 2022 hingga 2025, namun tetap tidak menunjukkan keaktifan, akhirnya dibubarkan dan bantuannya ditarik untuk dialihkan kepada kelompok lain. Realisasi bantuan juga menghadapi kendala antrean yang dapat memakan waktu hingga sekitar satu tahun serta jumlah yang terbatas. Namun yang paling mendasar, penyuluh pertanian lapangan menegaskan bahwa kewenangannya hanya sebatas edukasi, pendampingan, dan motivasi, sehingga alih fungsi lahan tidak dapat dicegah karena keputusan untuk menjual sepenuhnya berada pada pemilik lahan.

Modal sosial Gapoktan Marjasuma terbentuk melalui kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang membantu petani menghadapi penyusutan lahan pertanian. *Bonding social capital* memperkuat hubungan internal melalui pertukaran informasi lahan dan bantuan tenaga. Sementara itu, *bridging social capital* memperluas hubungan antarkelompok tani dan pedagang sehingga mendukung akses pemasaran. Hubungan dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan pemerintah mencerminkan *linking social capital* karena menghubungkan petani dengan lembaga yang memiliki kewenangan dan akses terhadap sumber daya.

Meskipun ketiga bentuk modal sosial tersebut membantu petani mempertahankan kegiatan usaha tani, keberadaannya belum mampu mengatasi ketidakpastian penguasaan lahan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kewenangan petani dan lembaga pendamping dalam memengaruhi keputusan pemilik lahan. Dengan demikian, modal sosial lebih berperan dalam membantu petani menghadapi dampak penyusutan lahan daripada mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

Penyuluhan pertanian perlu diarahkan untuk membantu petani memperoleh informasi mengenai penggunaan lahan yang sah, meningkatkan transparansi pengajuan bantuan, memperluas jaringan pemasaran, dan mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pertanian. Namun, perlindungan lahan pertanian tetap memerlukan dukungan kebijakan dari lembaga yang memiliki kewenangan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu gapoktan dengan melibatkan 11 informan. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan pengamatan jangka panjang sehingga belum dapat menjelaskan perubahan jaringan sosial petani dari waktu ke waktu.

Tabel 5. Ringkasan Temuan Pemanfaatan Modal Sosial *Bonding* dan *Bridging*

Dimensi	Praktik Pemanfaatan	Proses Pemanfaatan
Modal sosial *bonding*	Pertukaran informasi dan pencarian lahan pengganti; gotong royong dan bantuan tenaga saat panen yang kadang disertai upah; ikatan kekerabatan dan kesamaan asal daerah; kekompakan sebagai penopang usaha tani.	Komunikasi informal antarpetani ketika kehilangan lahan; musyawarah dalam pertemuan bulanan; pemeliharaan kebersamaan melalui arisan, yasinan, dan perjumpaan harian; serta penetapan batas ketika lahan benar-benar habis.
Modal sosial *bridging*	Pendampingan Dinas Pertanian melalui PPL; dukungan perguruan tinggi melalui KKN; kerja sama antarkelompok dalam gotong royong dan pemasaran; pemanfaatan bantuan ALSINTAN secara bergiliran; kemitraan dengan tengkulak dan pengepul lokal.	Pemeliharaan hubungan dengan pemerintah secara konsisten; pengajuan bantuan melalui proposal berjenjang (kelompok tani, Penyuluh Pertanian Lapangan, Lurah dan Camat, serta Dinas Pertanian); penyampaian informasi melalui RT, RW, dan Penyuluh Pertanian Lapangan, serta pendampingan dan monitoring yang disertai tuntutan akuntabilitas dari kelompok.
Keterbatasan	Kontribusi sektor swasta melalui CSR hampir tidak ada; kemitraan dengan pasar modern dihindari karena pembayaran tertunda dan proses sortir yang ketat; pemasaran daring masih bersifat individual.	Realisasi bantuan menghadapi antrean dan keterbatasan jumlah; Penyuluh Pertanian Lapangan tidak memiliki kewenangan untuk mencegah pemilik menjual atau mengalihfungsikan lahan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa ketiga unsur modal sosial Putnam bekerja secara terintegrasi pada kelompok tani Gapoktan Marjasuma di Kelurahan Sukamulya. Kepercayaan yang berlapis memungkinkan berlangsungnya sistem tumpang lahan, norma yang terinternalisasi menjaga keteraturan dan solidaritas, sementara jaringan yang terorganisasi membuka akses terhadap dukungan eksternal. Kebaruan utama temuan ini terletak pada pemahaman bahwa modal sosial pada kelompok tani di wilayah pinggiran kota yang mengalami alih fungsi lahan tidak berfungsi untuk mencegah alih fungsi lahan itu sendiri, melainkan untuk menghadapi keniscayaan perubahan melalui adaptasi berupa sistem tumpang lahan yang dimungkinkan oleh kuatnya kepercayaan sosial. Modal sosial *bonding* dimanfaatkan melalui hubungan internal antarpetani untuk pertukaran informasi lahan kosong, gotong royong panen, serta penguatan ikatan kekeluargaan dan kedaerahan, sejalan dengan pandangan Putnam bahwa *bonding* terbentuk dari hubungan yang erat dan homogen, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi serta timbal balik yang kuat. Modal sosial *bridging* dimanfaatkan melalui hubungan dengan kelompok tani lain, tengkulak, dan Penyuluh Pertanian Lapangan untuk memperoleh akses lahan, pemasaran, pendampingan, bantuan alat dan benih, serta informasi usaha tani, sejalan dengan pandangan Putnam bahwa *bridging* membuka peluang pertukaran informasi, memperluas jaringan, serta membuka peluang sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, keduanya terbukti hanya menjadi mekanisme bertahan yang efektif untuk mempertahankan kelangsungan usaha tani, dan memiliki batas yang jelas dalam menghadapi tekanan struktural akibat alih fungsi lahan yang terus berlangsung.

Secara konseptual, temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kemampuan petani mempertahankan kegiatan pertanian dan kemampuan mereka mempertahankan penguasaan lahan. Modal sosial *bonding* membantu petani menghadapi kesulitan melalui dukungan dan kerja sama antaranggota, sedangkan modal sosial *bridging* membuka akses terhadap informasi dan program bantuan pertanian. Namun, kedua bentuk modal sosial tersebut memiliki keterbatasan karena keputusan mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan berada di tangan pemilik lahan. Dengan demikian, modal sosial dapat membantu petani beradaptasi terhadap perubahan, tetapi tidak secara langsung memberikan kemampuan untuk mencegah atau mengendalikan alih fungsi lahan.

KESIMPULAN

Modal sosial kelompok tani Gapoktan Marjasuma terbentuk dari kepercayaan, norma, dan jaringan yang saling menopang. Penguatannya ditempuh melalui komunikasi dan musyawarah, transparansi pengelolaan bantuan, pemeliharaan kepercayaan pemilik lahan, kepedulian dan gotong royong bergilir, aturan tidak tertulis, pertemuan rutin, pengajuan proposal melalui penyuluh, serta jaringan tokoh perantara untuk mengakses lahan. Pemanfaatan modal sosial *bonding* berlangsung melalui pertukaran informasi lahan dan bantuan tenaga, sedangkan modal sosial *bridging* berlangsung melalui pendampingan Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan serta jaringan pemasaran tengkulak lokal. Keduanya memungkinkan petani mempertahankan kelangsungan usaha tani, tetapi terkendala oleh terputusnya regenerasi dan lemahnya kemitraan swasta, sehingga hanya berfungsi sebagai mekanisme bertahan dan tidak mampu menghentikan alih fungsi lahan.

Berdasarkan hasil temuan, penyuluhan pertanian perlu diarahkan pada penyediaan informasi mengenai lahan yang dapat digarap secara sah, peningkatan transparansi dalam pengajuan bantuan, perluasan jaringan pemasaran hasil pertanian, serta pelibatan generasi muda dalam kegiatan pertanian. Dalam hal ini, Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dapat berperan sebagai penghubung antara pengurus gapoktan dan pemerintah setempat. Namun, upaya perlindungan lahan pertanian tetap memerlukan dukungan kebijakan dan kewenangan lembaga terkait. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu gapoktan dengan jumlah informan yang terbatas. Selain itu, penelitian belum mengamati perubahan jaringan sosial petani dalam jangka panjang sehingga belum dapat menjelaskan perkembangan modal sosial dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Alfianti, D., Solikatun, S., & Rahmawati, R. (2021). Modal Sosial dalam Pengembangan Ekowisata di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, *3*(1), 120–131.

Alfitri. (2023). *Pengukuran Modal Sosial*. Idea Press Yogyakarta.

Apriliani, A., & Pratama, A. R. (2026). Systematic Literature Review: Inovasi Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, *7*(1), 1672–1692. https://doi.org/10.47687/snppvp.v7i1.2323

Burhan, M. R., Nurhadi, N., & Yuhastina, Y. (2022). Strategi Penguatan Modal Sosial Pedagang Bubur Kacang Ijo (Burjo) di Kawasan Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, *7*(1), 26–36. https://doi.org/10.24198/jsg.v7i1.26619

Devi, Supraptiningsih, Mubaroq, & H. (2023). Strategi Pemberdayaan melalui Penguatan Modal Sosial pada Kelompok Petani Bawang Merah di Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. *Prosiding SEMINALU (Seminar Nasional LPPM UNIPAR Jember)*, *1*(1), 360–367. http://prosiding.unipar.ac.id/index.php/seminalu/article/view/58

Fadhila, D., & Astutik, D. (2023). Penguatan Modal Sosial dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sayur Organik dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *7*(1), 102–111. https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.58496

Fandalla, V. D., Prayitno, G., & Dinanti, D. (2023). Peran Modal Sosial Dalam Alih Fungsi Lahan (Studi Kasus: Desa Mulyoagung). *Planning for Urban Region and Environment*, *12*(4), 169–178.

Farchan, Y. (2019). Modal Sosial Dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pengembangan Industri di Desa Gemulung Kabupaten Jepara. *Jurnal Renaissance*, *4*(1), 504–513. https://doi.org/10.53878/jr.v4i01.93

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., & Ambarwati, K. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.

Harahap, H. (2025). *Analisis modal sosial pada kelompok wanita tani Dahlia dalam program urban farming di Kelurahan Petukangan Selatan* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84987

Laksono, D. R., Prayitno, G., & Sari, N. (2022). Pengaruh Modal Sosial Terhadap Produktivitas Petani Di Kecamatan Pandaan. *Planning for Urban Region and Environment*, *11*(2), 1–12. https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/226/186

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse And Revival Of American Community*. Simon And Schuster.

Rahmadani, S., Pramudita, R. A., & Hidayah, A. (2025). Pemetaan Sosial Dan Penguatan Modal Sosial Perempuan Buruh Tani Pada Kelompok Pkk Di Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *11*(3), 1–44. https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i03.8028

Raodatul Adawia. (2025). *Modal Sosial Masyarakat Nelayan Patorani di Kelurahan Kalukalukuang Kabupaten Pangkep* [Skripsi/Tesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare]. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/12007/1/18.3500.025.pdf

Rinjani, Q., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2025). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Strategi Adaptasi Petani Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi

Masyarakat: Studi Kasus Pembangunan Perumahan Di Desa Peteluan Indah, Kabupaten Lombok Barat. *Prosiding SeNSosio (Seminar Nasional Prodi Sosiologi)*, *6*, 383–394.

Rosyidah, B. S., & Sudrajat, A. (2024). Fenomena Perubahan Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Masyarakat Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. *Paradikma*, *13*(3), 111–120. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/63305/48054

Santoso, P. T. (n.d.). *Memahami Modal Sosial*.

Sayuti, R. H., Mulyawati, S., Juniarsih, N., Nurjannah, S., & Hadi, A. P. (2024). *Modal sosial dan pembangunan masyarakat*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.

Setiawan, T. P., Ebrilyani, E., & Azilla, E. N. (2020). Modal Sosial Dalam Keberlanjutan Pertanian Di Tengah Alih Fungsi Lahan Di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, *5*(1). https://doi.org/10.24198/agricore.v5i1.27464

Siregar, N. I., Zulfiningrum, R., & Satriya, C. Y. (2025). Bonding, Bridging, dan Linking sebagai Modal Sosial dalam Pemulihan dan Keberlanjutan Desa Wisata Pascapandemi. *Jurnal Pariwisata Terapan*, *7*(2), 179–197.

Subangkit, A., Yanti, D. F., Kusnadi, L. M., & Sonuari, M. I. (2020). Modal Sosial Dalam Pengembangan Urban Farming Di Kampung Hidroponik Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *8*(2), 154–160. https://doi.org/10.15408/empati.v8i2.14691

Syarif, A., Arwati, S., & Firmansyah, A. P. (2025). *Modal Sosial Pertanian*. NEM.

Syofian, S., Sujianto, S., & Handoko, T. (2020). Modal Sosial Kelembagaan Petani Karet di Kabupaten Kuantan Singingi. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, *5*(1), 52–61. https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i1.6388

Uphoff, N. (2000). Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation. In P. Dasgupta & I. Serageldin (Eds.), *Social Capital: A Multifaceted Perspective* (pp. 215–249). World Bank.

Yuliantina, N., Mulyana, A., Wildayana, E., & Lionardo, A. (2024). Economic Impact of Land Use Change on Rice Paddy Farmers in Palembang City Indonesia. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, *20*, 546–561. https://doi.org/10.37394/232015.2024.20.53

Yustika, A. E. (2008). *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Bayumedia Publishing.